



Pandangan Harian *Suara Merdeka* dalam Konflik KPK vs Polri Jilid II: Analisis Wacana Kritis pada Tajuk Rencana

Endro Nugroho Wasono Aji¹ ✉ dan Fathur Rokhman²

¹ Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

² Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima:

April 2017

Disetujui:

Mei 2017

Dipublikasikan:

Desember 2017

Keywords:

Suara Merdeka,

KPK vs Polri,

critical discourse analysis,

not objective

Abstrak

KPK dan Polri merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia, tetapi beberapa kali keduanya justru mengalami konflik. Konflik dua lembaga penegak hukum ini tidak lepas dari sorot pemberitaan, baik koran lokal maupun nasional. *Suara Merdeka* sebagai korannya Jawa Tengah juga ikut memberitakan konflik tersebut. Tujuan penelitian adalah mengungkap pandangan harian *Suara Merdeka* dalam konflik KPK vs Polri jilid II dengan menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang secara simultan mengkaji: teks-teks bahasa baik lisan maupun tulisan; praktik kewacanaan; dan praktik sosiokultural. Data penelitian ini berupa penggalan wacana yang diambil dari teks tajuk rencana yang dimuat di dalam harian *Suara Merdeka*. Pandangan harian *Suara Merdeka* yang tercermin dari penggunaan kosakata dalam tajuk rencana cenderung berpihak pada institusi KPK. Hal itu tampak pada penggunaan pola klasifikasi, kosakata yang diperjuangkan secara ideologis, metafora, dan relasi makna. Dengan demikian, pandangan harian *Suara Merdeka* dalam hal pemberitaan konflik KPK vs Polri jilid II cenderung tidak objektif.

Abstract

KPK and Polri are law enforcement institutions, but both several times just had conflict. Conflict between the two law enforcement agencies could not be ignored by local and national highlight newspapers. A newspaper in central Java, Suara Merdeka, also highlighted the conflict. This article studied how Suara Merdeka view in conflict between KPK and Polri volume II used critical discourse analysis model of Fairclough. Based on text description, vocabulary used in editorial tend on KPK side. Therefore, Suara Merdeka view in the conflict between KPK and Polri volume II was not objective.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Jl. Elang Raya No.1, Semarang, Jawa Tengah (50272)

E-mail: wasono_ajie@yahoo.com

PENDAHULUAN

Konflik KPK vs Polri jilid II terjadi ketika Presiden Joko Widodo menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Akan tetapi, beberapa saat kemudian KPK menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka konflik penerimaan suap dan transaksi mencurigakan saat Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri. Langkah KPK ini kemudian dibalas oleh Polri dengan menangkap salah satu Komisioner Pimpinan KPK Bambang Wijayanto. Selain itu pimpinan KPK yang lain, yaitu Adnan Pandu Praja dan Abraham Samad juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Konflik dua lembaga penegak hukum ini tidak lepas dari sorot pemberitaan, baik koran lokal maupun nasional. *Suara Merdeka* sebagai korannya Jawa Tengah juga ikut memberitakan konflik tersebut. Bahkan, topik tersebut beberapa kali dibahas dalam tajuk rencana harian *Suara Merdeka*. Tajuk rencana atau editorial pada dasarnya merupakan roh bagi sebuah surat kabar. Pada tajuk itulah pandangan, pikiran, impresi, dan kritisisme redaksi pengelola harian terhadap beragam peristiwa dikonstruksikan untuk menghasilkan sebuah titik pandang yang ditampilkan sebagai objektivitas yang subjektif di tengah-tengah publik. Tajuk rencana juga memuat sikap dan opini redaksional media bersangkutan terhadap objek berita. Selain itu, tajuk rencana juga memuat stigmatisasi, penggambaran citra positif atau pun negatif terhadap seseorang, institusi, atau kebijakan yang menjadi bahan pemberitaan. Dalam tajuk rencana sikap media yang bersangkutan tidak terpengaruh oleh pernyataan sumber berita. Berbeda dengan artikel-artikel berita yang rentan dipengaruhi oleh kinerja dan pengetahuan oknum wartawan peliput (Yursak, dkk. 2007).

Sebagai salah satu produk jurnalistik tajuk rencana atau pun editorial menarik diteliti untuk menangkap pelbagai kecenderungan, sikap, dan pandangan media dalam memaknai sebuah peristiwa. Artikel ini ditulis untuk mengungkap bagaimana pandangan harian *Suara*

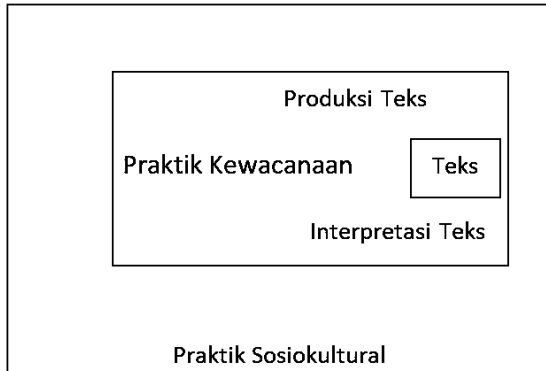
Merdeka dalam konflik KPK vs Polri jilid II. Menurut penelitian Mardikantoro (2014), harian *Suara Merdeka* memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang dapat diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Tajuk rencana dijadikan objek penelitian karena di situlah letak cerminan sikap, pandangan, atau opini pihak penerbit terhadap masalah yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat (Wibowo, 2001).

METODE

Sumber data penelitian ini adalah tajuk rencana di harian *Suara Merdeka* yang dimuat pada bulan Januari hingga Maret 2015. Teks yang dijadikan data merupakan teks tajuk rencana yang membahas konflik KPK vs Polisi jilid II. Data penelitian ini berupa penggalan wacana yang diambil dari teks tajuk rencana yang dimuat di harian *Suara Merdeka*.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough. Analisis wacana kritis dalam pandangan Fairclough harus dilihat secara simultan sebagai: (i) teks-teks bahasa, baik lisan atau tulisan, (ii) praktik kewacanaan, yaitu produksi dan interpretasi teks, dan (iii) praktik sosiokultural, yakni perubahan-perubahan masyarakat, institusi, dan kebudayaan yang menentukan bentuk dan makna sebuah wacana. Ketiga unsur tersebut dinamakan dimensi wacana (Santoso, 2012). Tiga dimensi itu dapat dijelaskan dalam tiga tahap analisis wacana kritis yang berupa deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Deskripsi merupakan tingkatan yang berhubungan dengan sifat formal teks. Interpretasi berkaitan dengan hubungan antara teks dan interaksi yang melihat teks sebagai suatu proses produksi dan sebagai proses sumber dalam proses interpretasi. Eksplanasi berkaitan dengan hubungan antara konteks interaksi dan sosial dengan penentuan sosial proses produksi dan interpretasi serta efek-efek sosialnya (Fairclough, 2003). Prosedur analisis wacana kritis digambarkan Fairclough. (Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka Analisis Wacana Kritis Model Fairclough



Dalam analisis wacana kritis model Fairclough teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, gramatika, dan struktur teks. Fairclough juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau antarkalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian.

Praktik kewacanaan berkaitan dengan produksi dan interpretasi proses-proses diskursif. Analisis tahap kedua analisis wacana kritis ini berupa tahap menafsirkan relasi antara produksi dan interpretasi proses-proses diskursif itu. Dua hal yang menjadi lahan adalah interpretasi teks dan interpretasi konteks. Dalam interpretasi teks ada empat level ranah interpretasi, yaitu: (i) bentuk lahir tuturan, (ii) makna ujaran, (iii) koherensi lokal, (iv) struktur teks dan poin. Dalam interpretasi konteks ada dua level interpretasi, yakni: (i) konteks situasional, dan (ii) konteks antarteks (Santoso, 2012).

Praktik sosiokultural mengkaji hubungan antara teks dan struktur sosial dimediasikan oleh konteks sosial wacana. Tahap ini bertujuan untuk menempatkan wacana sebagai bagian dari proses sosial, yaitu dengan cara menunjukkan bagaimana wacana dibentuk oleh struktur sosial dan bagaimana wacana ikut mempengaruhi struktur sosial (Darma, 2009). Namun, karena keterbatasan halaman makalah ini hanya akan membahas pandangan harian *Suara Merdeka* yang tercermin dalam penggunaan kosakata pada tataran deskripsi teks. Analisis pada dimensi praktik kewacanaan dan praktik sosiokultural dibahas secara simultan dalam deskripsi teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Teks Tajuk Rencana Harian *Suara Merdeka*

Untuk mengungkap pandangan harian *Suara Merdeka* dalam konflik KPK vs Polri jilid II dianalisis penggunaan kosakata dalam deskripsi teks. Dari pilihan kosakata tampak pandangan harian *Suara Merdeka* terhadap konflik tersebut, apakah harian *Suara Merdeka* cenderung berpihak pada institusi KPK, Polri, atau pemerintah. Berikut ini analisis teks pada wacana tajuk rencana harian *Suara Merdeka*.

Kosakata dalam Wacana Tajuk Rencana Kasus KPK vs Polri Jilid II

Keberadaan kosakata tertentu dalam tajuk rencana *Suara Merdeka* digunakan sebagai alat menggambarkan realitas. Hal tersebut dapat disimak dari keberadaan kata-kata kunci dalam wacana. Dalam teks tajuk rencana *Suara Merdeka* yang membahas konflik KPK versus Polri jilid II kosakata yang digunakan berupa pola klasifikasi, kata-kata yang diperjuangkan secara ideologis, metafora, dan relasi makna.

Pola Klasifikasi

Salah satu aspek kosakata yang terdapat dalam teks tajuk rencana ialah pola klasifikasi. Pola klasifikasi berkenaan dengan pilihan kosakata tertentu yang digunakan untuk mengklasifikasikan realitas tertentu. Sesuai dengan namanya kosakata digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan realitas. Pola klasifikasi merupakan sebuah cara tertentu untuk membagi beberapa aspek realitas yang menggunakan sebuah representasi ideologis tertentu (Santoso, 2012). Pola klasifikasi digunakan redaksi *Suara Merdeka* untuk memberi label seseorang atau institusi termasuk ke dalam kelompok atau golongan tertentu. Dengan memberikan label tersebut redaksi dengan jelas membedakan kelompok-kelompok, baik yang pro atau yang antipemberantasan korupsi. Pada tajuk rencana *Suara Merdeka* yang berjudul "Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka" pola klasifikasi tampak pada penggalan wacana berikut:

- (1) Kita tahu Presiden Jokowi terkejut dan menganggap kasus Budi telah selesai lewat klarifikasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2010. Tak ada juga tanda-tanda rekening gendut Budi bakal dipersoalkan di jalur hukum. Tentu terkejut saja, tidak cukup. Jokowi harus segera merespons persoalan ini agar tak dianggap sebagai presiden yang *antipemberantasan korupsi*. (TR “Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka”)

Pola klasifikasi pada penggalan wacana tersebut tampak pada penggunaan ungkapan *antipemberantasan korupsi*. Frasa tersebut disematkan pada presiden Joko Widodo kalau presiden tidak dapat merespons (menyelesaikan) persoalan KPK dan Polri dengan baik, seperti terungkap dalam kalimat berikut, “Jokowi harus segera merespons persoalan ini agar tak dianggap sebagai presiden yang *antipemberantasan korupsi*”. Implikasi yang dapat dibaca dari kalimat tersebut adalah agar tidak dianggap sebagai presiden yang *antipemberantasan korupsi*, Jokowi harus segera merespons persoalan ini (perseteruan KPK Polri). Dengan kata lain, jika Jokowi tidak dapat merespons persoalan tersebut, presiden diklasifikasikan sebagai *antipemberantasan korupsi* atau prokoruptor. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan perseteruan KPK dan Polri. Redaksi *Suara Merdeka* memanfaatkan pola klasifikasi *antipemberantasan koperasi* karena pola klasifikasi tersebut mempunyai daya ilokusi yang tinggi untuk mempengaruhi mitra tutur dalam hal ini Presiden Jokowi agar segera menyelesaikan perseteruan KPK dan Polri.

Pola klasifikasi lainnya terdapat dalam tajuk rencana yang berjudul “Teladan Moral Bambang Widjojanto”. Hal tersebut tampak pada pemberian label *moralitas* yang disematkan pada sosok Bambang Widjojanto.

- (2) Pernyataan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana kita garisbawahi sebagai usikan keras tentang *moralitas* pejabat publik. Ia menilai, pengajuan pengunduran diri sementara Bambang Widjojanto dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan kelasnya sebagai orang yang konsisten menjaga

moralitas antikorupsi. Dan, sikap itu bisa diperbandingkan dengan tersangka lainnya.

Denny menyebut, sikap jantan Bambang bisa menjadi contoh *moralitas* pejabat publik. Tokoh lain yang diperbandingkan adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus rekening gendut, tidak mengindahkan desakan mundur dari berbagai kalangan, terutama setelah Bambang Widjojanto mengajukan pengunduran diri sementara. (TR “Teladan Moral Bambang Widjojanto”)

Dalam tajuk rencana *Suara Merdeka* Bambang Widjojanto digambarkan sebagai sosok yang menjaga *moralitas*, menjadi contoh *moralitas*. Sebaliknya, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit Budi Gunawan digambarkan sebagai sosok yang “tidak bermoral”. Bambang Widjojanto menjadi sosok yang bermoral karena pengajuan pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua KPK. Sementara itu, sebagai antitesis sosok Budi Gunawan menjadi sosok yang “tidak bermoral” karena meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak mengindahkan desakan mundur dari berbagai kalangan. Dari pola klasifikasi tersebut tampak jelas keberpihakan redaksi *Suara Merdeka* pada institusi KPK yang dalam hal ini direpresentasi oleh sosok Bambang Widjojanto. Sebaliknya, redaksi *Suara Merdeka* memarginalkan institusi Polri yang direpresentasi oleh sosok Budi Gunawan dengan mendeskripsikannya secara negatif.

Pola klasifikasi lain yang ditemukan dalam teks tajuk rencana, yaitu *petugas partai*. Dalam tajuk rencana frasa *petugas partai* disematkan pada Jokowi. Kata *petugas* bermakna ‘orang yang bertugas melaksanakan sesuatu’. *Petugas partai* artinya ‘orang yang bertugas melaksanakan sesuatu yang telah digariskan partai’. Dengan demikian Jokowi sebagai presiden hanya bertugas melaksanakan apa yang diamanatkan oleh partainya, yaitu PDI Perjuangan. Adapun istilah *petugas partai* dituturkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati saat deklarasi Koalisi Indonesia Hebat pada 2014. “Saya pesan

ke Pak Jokowi, sampeyan tak jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja. *Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai.*" Pola klasifikasi ungkapan *petugas partai* dimanfaatkan Megawati untuk mendominasi posisi Jokowi. Hal tersebut dilakukan agar Jokowi meskipun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi dia hanyalah *petugas partai*. Sebagai *petugas partai* Jokowi harus patuh pada ketua partainya termasuk mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk mengkonstruksi realitas baik positif maupun negatif. Ideologi wartawan menentukan praktik keawacanaan di media massa (Supriyadi & Ida Zulaeha, 2017:2).

Kata-kata yang Diperjuangkan secara Ideologis

Aspek kosakata lain yang terdapat dalam teks tajuk rencana *Suara Merdeka* ialah kata-kata yang diperjuangkan secara ideologis. Kata yang diperjuangkan adalah kata-kata yang diusahakan ditanamkan atau dinaturalisasikan ke dalam pikiran individu masyarakat sasaran melalui berbagai aktivitas agar kata-kata tertentu itu menjadi bagian dari kehidupan individu dan masyarakat itu dan kata-kata itu dipercayai sebagai sesuatu yang "penting" bagi kehidupannya (Santoso, 2012). Dalam tajuk rencana ditemukan kata *kriminalisasi*, seperti tampak dalam penggalan wacana berikut:

- (3) Penegasan agar proses hukum di KPK dan Polri berlangsung transparan, terang benderang, dan tidak ada *kriminalisasi* kita terjemahkan sebagai sikap untuk menjauhkan politisasi kasus. (TR "Cukup Ampuhkah Sikap Jokowi?")

Pada penggalan wacana di atas redaksi menegaskan agar proses hukum di KPK dan Polri berlangsung transparan, terang benderang, dan tidak ada *kriminalisasi*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata *kriminalisasi* bermakna 'proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat'. Dengan menggunakan kata *kriminalisasi* redaksi ingin menanamkan pemahaman pada khalayak agar perseteruan

KPK dan Polri tetap berjalan di ranah hukum dan tidak dibawa ke ranah politik.

Kata-kata yang diperjuangkan secara ideologis lain terdapat dalam tajuk rencana yang berjudul "Pelumpuhan KPK Ancaman Serius". Kata-kata tersebut berusaha ditanamkan atau dinaturalisasikan ke dalam pikiran khalayak. Dalam kasus perseteruan KPK dan Polri ada kosakata yang diperjuangkan oleh redaksi *Suara Merdeka* agar menjadi bagian kehidupan khalayak. Kata-kata tersebut ditanamkan agar masyarakat menerimanya sebagai fakta. Kosakata yang diperjuangkan oleh penulis tajuk rencana, yaitu *dijadikan tersangka* atau *target kriminalisasi*, seperti terlihat pada penggalan teks berikut:

- (4) Kabareskrim Polri Irjen Budi Waseso telah memastikan Abraham segera *dijadikan tersangka*. Bilamana dua pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, juga dijadikan *target kriminalisasi* oleh Polri, maka KPK tidak lagi memiliki pimpinan yang bertanggung jawab. (TR "Pelumpuhan KPK Ancaman Serius")

Kata *dijadikan tersangka* mengandung implikasi makna 'secara sengaja dijadikan tersangka walaupun yang bersangkutan tidak melakukan tindakan melanggar hukum'. Atau dengan istilah lain disebut *target kriminalisasi*. Artinya, sebenarnya pimpinan KPK tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi oleh polisi mereka dijadikan tersangka dengan tuduhan yang mengada-ada. Dengan kedua ungkapan tersebut redaksi ingin menaturalisasikan kepada khalayak bahwa penangkapan pimpinan KPK hanyalah tindakan balas dendam Polri pada KPK. Jadi, tindakan Polri menangkap dan menahan komisioner KPK bukan merupakan penegakkan hukum, tetapi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan institusi Polri pada pimpinan KPK harus dihentikan.

Penggunaan Metafora

Aspek kosakata lain yang digunakan dalam tajuk rencana *Suara Merdeka* berupa penggunaan metafora. Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal

secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat (Keraf, 2004). Definisi yang sedikit berbeda disampaikan oleh Kridalaksana (2011), yang memberi batasan metafora sebagai pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. Dalam pandangan linguistik, terdapat tiga jenis metafora, yakni: (1) metafora nominatif, baik nominatif subjektif maupun nominatif objektif, (2) metafora predikatif, dan (3) metafora kalimat. Metafora nominatif subjektif adalah metafora yang lambang kiasnya muncul hanya pada subjek kalimat (pokok kalimat), sementara komponen-komponen kalimat yang lain tetap dinyatakan dengan kata-kata yang mempunyai makna langsung. Pada metafora nominatif objektif, lambang kias hanya muncul pada objek kalimat atau komplemen, sementara komponen lain dari kalimat tetap dinyatakan dengan kata yang mempunyai makna langsung. Dalam metafora predikatif, kata-kata lambang kias hanya terdapat pada predikat kalimat, sedangkan subjek dan objeknya (jika ada) masih dinyatakan dalam makna langsung. Metafora yang terakhir, yakni metafora kalimat adalah metafora yang seluruh lambang kias yang dipakai tidak terbatas pada nominatif dan predikatnya saja, melainkan seluruh komponen dalam kalimat metaforis itu merupakan lambang kias (Santoso, 2002).

Dalam teks tajuk rencana yang berjudul “Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka” metafora nominatif digunakan redaksi untuk mendeskripsikan institusi KPK, seperti tampak pada penggunaan ungkapan *tanpa tebang pilih* dalam penggalan wacana berikut:

- (5) ... Peristiwa ini menandakan, betapa tanpa didesak oleh lembaga mana pun – termasuk oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), PSHK, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil).

KPK proaktif menjalankan tugas penegakan hukum tanpa kompromi. Juga *tanpa tebang pilih* karena sekalipun pemerintah dan DPR ditengarai memuluskan jalan Budi Gunawan menjadi Kapolri, tetap saja KPK

menersangkakan mantan ajudan Megawati itu. (TR “Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka”)

Kata *tebang* biasanya digunakan untuk menyatakan makna ‘memotong batang pohon’. Namun, makna *tebang* dalam metafora *tanpa tebang pilih* dapat diasosiasikan sebagai ‘menyelesaikan’. Adapun pohon dalam hal ini dibandingkan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Dengan demikian, metafora *tanpa tebang pilih* dapat diartikan ‘KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya tidak pilih-pilih’. Dengan kata lain, KPK dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum ‘dilakukan secara adil (tidak pilih-pilih)’.

Metafora *tanpa tebang pilih* mempunyai makna eksperensial positif terhadap institusi KPK. Ungkapan *tebang pilih* sebenarnya sudah muncul ketika KPK diketuai oleh Antasari Azhar. Waktu itu KPK hanya menangani atau mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar-besar, sedangkan kasus korupsi kecil tidak menjadi perhatian KPK. Anggapan KPK *tebang pilih* dibantah oleh Antasari Azhar dalam pernyataan berikut:

- (6) “KPK bisa mengusut pejabat negara dan penegak hukum atau yang terkait perkara korupsi dengan lembaga tadi. Yang dimaksud pejabat negara ialah pejabat-pejabat yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Di situ jelas rinciannya. Pejabat negara yang terkait dalam pasal itulah yang ditangani KPK.

Jadi, KPK tidak mengusut apabila korupsi itu dilakukan oleh kepala dinas. Nah itulah, dulu banyak kesan saya *tebang pilih*, mau yang besar-besar saja, sedangkan yang kecil dilewatkan. Memang UU-nya seperti itu.” (Pandur, 2011)

Makna eksperensial positif yang lain secara tidak langsung tampak pada penggunaan metafora predikatif *tak turun dari langit*, seperti terlihat pada kutipan teks berikut:

- (7) Keputusan menjadikan Budi tersangka itu, *tak turun dari langit* begitu saja. Ada proses “diasumsikan”, atau “ditengarai”, serta “dicurigai” korupsi, baru kemudian dicoba “dibuktikan” dengan hukum yang rasional, logis,

dan memenuhi standar masyarakat beradab. (TR “Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka”)

Metafora *tak turun dari langit* mempunyai makna kiasan ‘tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan tidak mudah’. Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka digambarkan sebagai sesuatu yang tidak mudah. Namun, melalui proses yang panjang, yaitu “diasumsikan”, atau “ditengarai”, serta “dicurigai” korupsi, baru kemudian dicoba “dibuktikan”. Pemanfaatan kata-kata formal tersebut (*diasumsikan, ditengarai, dicurigai, dan dibuktikan*) menciptakan kesan-kesan kekuasaan, posisi, dan status. Kesan kekuasaan tampak pada wewenang KPK untuk melakukan proses *diasumsikan, ditengarai, dicurigai, dan dibuktikan* hingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut menunjukkan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum lebih dominan dibanding dengan lembaga Polri. Dalam hal ini institusi Polri direpresentasi oleh Komjen Budi Gunawan yang statusnya adalah tersangka.

Sebaliknya, Redaksi *Suara Merdeka* dalam tajuk rencana yang berjudul “Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka” merepresentasi Budi Gunawan (Polri) menggunakan metafora nominatif subjektif yang mempunyai makna eksperensial negatif, seperti *rekening gendut*. Hal tersebut tampak pada penggalan wacana berikut:

- (8) Di luar perkiraan pemerintah maupun DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisar Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka. Setelah *rekening gendut* Budi dicurigai, KPK menemukan unsur pidana dan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. (TR “Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka”)

Kata *gendut* biasanya digunakan untuk mengacu pada bentuk tubuh, tetapi dalam wacana tajuk rencana “Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka” kata *gendut* digunakan untuk menjelaskan kata *rekening*. Pada penggalan wacana tajuk rencana tersebut dijelaskan bahwa KPK menetapkan calon Kapolri, Komjen. Budi Gunawan, sebagai tersangka. Penetapan sebagai

tersangka tersebut dilakukan setelah KPK mencurigai *rekening gendut* yang dimiliki oleh Komjen. Budi Gunawan dan KPK menemukan unsur pidana dan lebih dari dua alat bukti. Bentuk *rekening gendut* bermakna ‘rekening seseorang di bank yang jumlahnya sangat banyak dan dicurigai diperoleh secara tidak wajar, seperti hasil korupsi atau pencucian uang (*money laundry*)’. Istilah rekening gendut ini cukup populer digunakan di media massa seiring dengan maraknya pengungkapan kasus korupsi di Indonesia oleh KPK. Dengan menggunakan metafora yang sudah populer di masyarakat redaksi hendak menggambarkan Budi Gunawan sebagai sosok yang korup sehingga tidak layak dicalonkan sebagai Kapolri. Penggunaan kata *gendut* yang mengacu pada konteks rekening gendut merupakan wujud representasi ideologi wartawan dalam pemberitaan (Widyawari & Ida Zulaeha, 2016:5). Adapun tindak korupsi yang disangkakan pada Komjen Budi Gunawan adalah dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, ketika dia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri dan jabatan lain di Markas Besar Polri pada tahun 2003-2006.

Relasi Makna

Relasi makna seringkali memiliki makna ideologis (Santoso, 2012). Relasi makna yang digunakan dalam tajuk rencana *Suara Merdeka* berupa sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Sangat sulit menemukan padanan kata yang mutlak sama. Oleh karena itu, pada kenyataannya seseorang hanya mencari hubungan yang mendekati makna antarkata. Sebuah uji sinonim secara garis besar untuk menentukan apakah kata-kata dapat saling menggantikan dengan sedikit mempengaruhi makna (Fairclough, 2003). Dalam tajuk rencana yang berjudul “KPK dalam Kepungan” terdapat penggunaan relasi makna yang berupa sinonim *perseteruan* dan *perang*, seperti tampak pada kutipan berikut:

- (9) Akibat sejumlah saksi dalam kasus Komjen Budi Gunawan mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

kecurigaan tentang *perseteruan* Polri versus KPK langsung mencuat. Sebagian besar pemberitaan media menyoroti peristiwa itu dari sudut pandang "*perang*" antara Polri dan KPK seperti pernah terjadi pada kasus-kasus penyelidikan KPK terdahulu yang melibatkan petinggi-petinggi Polri sebagai tersangka. Masyarakat sebetulnya berharap bahwa dugaan "*perang*" antara Polri versus KPK itu tidaklah benar. (TR "KPK dalam Kepungan")

Kata *perseteruan* bermakna 'perihal bermusuhan; permusuhan', sedangkan *perang* bermakna 'permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dsb.)'. Meskipun kedua kata tersebut mempunyai makna 'permusuhan', kata *perang* terlalu berlebihan jika digunakan untuk menggambarkan realitas konflik antara KPK dan Polri. Penggunaan sinonim tersebut digunakan redaksi untuk menjelaskan pada khalayak bahwa perseteruan antarlembaga penegak hukum tersebut sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Sinonim yang serupa terdapat dalam tajuk rencana yang berjudul "Jangan Biarkan KPK Runtuh". Relasi makna tersebut berupa sinonim kata *perseteruan*, *kekisruhan*, dan *pertarungan*, seperti tampak pada penggalan wacana berikut:

- (10) Kekhawatiran tentang *perseteruan* yang semakin meruncing dan memanas di lingkaran elite kekuasaan makin kentara dengan peristiwa penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Penangkapan Bambang mau tak mau akan dikaitkan dengan *kekisruhan* yang terjadi belakangan ini, setelah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

Banyak pihak menyebutnya sebagai *pertarungan* Polri versus KPK. (TR "Jangan Biarkan KPK Runtuh")

Kata *perseteruan*, *kekisruhan*, dan *pertarungan* pada kalimat-kalimat di atas mengacu pada makna yang sama, yaitu konflik antara institusi KPK dan Polri. Kata *perseteruan* berasal dari kata dasar *seteru* yang bermakna

'musuh', *perseteruan* bermakna 'perihal bermusuhan atau permusuhan'. Kata *kekisruhan* berasal dari kata *kisruh* yang bermakna 'ribut'. Jadi, kata *kekisruhan* bermakna 'keributan'. Adapun kata *pertarungan* berasal dari kata dasar *tarung* yang bermakna 'berkelahi', *pertarungan* bermakna 'perihal berkelahi atau perkelahian'. Dari pembahasan makna dasar ketiga kata tersebut tampak perbedaan nuansa maknanya. Pada kalimat pertama konflik antara KPK dan Polri disebut sebagai *perseteruan* karena konflik tersebut belum terlalu terlihat jelas. Hal tersebut diindikasikan oleh kata *kekhawatiran* dan *kentara*. Pada kalimat kedua, konflik antara KPK dan Polri disebut *kekisruhan* karena konflik keduanya semakin memanas setelah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Pada contoh kalimat tiga, konflik tersebut digambarkan sebagai *pertarungan* dua lembaga. Sinonim dalam tajuk rencana dimanfaatkan redaksi *Suara Merdeka* untuk mendeskripsikan peristiwa yang sama dengan nuansa yang berbeda.

Dalam tajuk rencana yang berjudul "Keberisikan yang Berlarut-larut" relasi makna yang berupa sinonim juga digunakan. Dalam hal ini sinonim digunakan redaksi untuk menjelaskan situasi yang sama, seperti tampak pada penggalan wacana berikut:

- (11) Kini, semuanya *kembali* pada pilihan dan keputusan Jokowi. Tidak ada pilihan yang tidak mengandung risiko. Karena itu, *berpulang* juga pada Presiden untuk mampu mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul akibat keputusan yang telah diambil. (TR "Keberisikan yang Berlarut-larut")

Kata *kembali* pada kalimat, "Kini, semuanya *kembali* pada pilihan dan keputusan Jokowi. Tidak ada pilihan yang tidak mengandung risiko" serupa maknanya dengan kata *berpulang* dalam kalimat, "Karena itu, *berpulang* juga pada Presiden untuk mampu mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul akibat keputusan yang telah diambil." Makna kata *berpulang* pada kalimat kedua juga mempunyai arti 'kembali' seperti pada kalimat pertama. Artinya, presiden sudah memperoleh

masuk-masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan rekomendasi Tim Independen. Akhirnya, keputusan tetap *kembali* di tangan presiden apa pun konsekuensinya. Kata *kembali* sebenarnya bermakna 'balik lagi', sedangkan kata *berpulang* lebih sering digunakan untuk menyatakan makna 'pulang ke hadirat Ilahi atau meninggal dunia'. Penggunaan sinonim kata *berpulang* menyiratkan makna 'pesimisme' redaksi terhadap sikap presiden dalam penyelesaian konflik KPK dan Polri.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan harian *Suara Merdeka* yang tercermin dari penggunaan kosakata dalam tajuk rencana cenderung berpihak pada institusi KPK. Hal tersebut tampak pada penggunaan pola klasifikasi, kosakata yang diperjuangkan secara ideologis, metafora, dan relasi makna. Dengan demikian, pandangan harian *Suara Merdeka* dalam hal pemberitaan konflik KPK vs Polri jilid II tidak objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Fairclough, Norman. 2003. *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. Malang: Boyan.
- Keraf, Gorys. 2004. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. 2011. *Kamus Linguistik*. Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2014. Analisis Wacana Kritis pada Tajuk Rencana (Anti) Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia. *Jurnal LITERA* 13(2).
- Pandur, Servas. 2011. *Testimoni Antasari Azhar untuk Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Laras Indra Semesta.
- Santosa, Anang. 2002. *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Wacana Politik*. Disertasi. Malang: PPS Universitas Negeri Malang.
- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Supriyadi & Ida Zulaeha. 2017. Dimensi Ekonomi, Politik, dan Ideologi pada Artikel-Artikel di Media Massa Cetak Jawa Pos dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis. *Seloka, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 6(1): 1-14.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka>
- Wibowo, Wahyu. 2001. *Otonomi Bahasa Tujuh Strategi Tulis Pragmatik bagi Praktisi Bisnis dan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia.
- Widyawari, Caecilia Petra Gading May & Ida Zulaeha. 2016. Representasi Ideologi dalam Tuturan Santun para Pejabat Negara pada Talk Show Mata Najwa. *Seloka, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 5(1): 1-11.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka>